

INDIKATOR KESEJAHTERAAN,  
INDIKATOR KEBERLANJUTAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Editor:  
Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi

**Judul:**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN, INDIKATOR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
x+150 hlm.; 16 x 24 cm

**ISBN: 978-602-5562-09-9**

Cetakan Pertama, 2017

**Penulis:**

Sri Nurhayati Qodriyatun  
Anih Sri Suryani  
Rahmi Yuningsih

**Editor:**

Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi

**Desain Sampul:**

Dino Sanggrha Irnanda

**Tata Letak:**

Kamilia Sukmawati

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia  
Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bekerjasama dengan:**

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim  
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim  
Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010  
[www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)

# Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku berjudul “Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia”. Buku yang ditulis oleh para peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Secara kritis penulis berusaha mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, baik dalam pendefinisian, pengoperasionalsasiannya, ataupun dalam pengukurannya. Terlihat masih ada sisi kelemahan dari penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan pembangunan lingkungan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Perlu adanya investasi ulang terhadap hasil pemanfaatan sumber daya melalui upaya pemulihannya;
- b. Perlu ada pengembangan kebijakan yang menangkal terjadinya krisis modal sumber daya alam agar meningkat tingkat minimum kelimpahan sumber daya alam; dan
- c. Perlu ada upaya mengintegrasikan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam kebijakan nasional secara holistik dan komprehensif.

Berbagai upaya tersebut harus ditangkap oleh DPR melalui pelaksanaan fungsinya, yaitu pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah dengan tekun melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi yang telah menyunting buku ini sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca budiman.

Apabila dalam penerbitan buku ini masih terdapat kekurangan, baik dari sisi substansi ataupun teknis, kami mohon maaf atas berbagai kekurangan tersebut. Untuk penyempurnaan berbagai kekurangan itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Akhir kata, kami berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Desember 2017  
Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.  
NIP.197111171998031004

# Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Grafik .....	viii
Daftar Diagram .....	ix

---

## **Prolog**

Membaca Telaah Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia .....	1
(Catatan Editor)	

---

Pembangunan Berkelanjutan: Mendefinisikan, Mengoperasikan dan Mengukur dalam Pembangunan Nasional .....	7
<b>Sri Nurhayati Qodriyatun</b>	
Pendahuluan .....	7
Hubungan Manusia dengan Lingkungan Hidup .....	9
Hubungan Lingkungan Hidup dengan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat .....	13
Mendefinisikan dan Mengoperasikan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Nasional .....	21
Mengukur Pembangunan Berkelanjutan .....	26
Penutup .....	41
Daftar Pustaka .....	42

Pengaruh Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Studi Persepsi Masyarakat di Provinsi Gorontalo) .....	45
<b>Anih Sri Suryani</b>	
Pendahuluan .....	45
Indikator Kualitas Lingkungan Hidup .....	50
Penyempurnaan Perhitungan IKLH dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Sosial .....	52
Kebutuhan Dasar .....	58
Metodologi .....	59
Kondisi Kualitas Lingkungan dan Sosial Ekonomi Provinsi Gorontalo .....	64
Hubungan Antara Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	80
Penutup .....	93
Daftar Pustaka .....	96
Lampiran A .....	100
Lampiran B .....	106
Lampiran C .....	109
Lampiran D .....	119
<hr/>	
Kualitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat .....	123
<b>Rahmi Yuningsih</b>	
Pendahuluan .....	123
Kualitas Lingkungan Hidup .....	128
Kaitan Determinan Lingkungan Dengan Derajat Kesehatan Masyarakat .....	134
Aspek Lingkungan yang Mendukung Hidup Sehat (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo) .....	139
Penutup .....	142
Daftar pustaka .....	143
<hr/>	
Epilog .....	145
Index .....	147
Biografi Editor dan Penulis .....	149

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Telaah BPS terhadap Ketersediaan Data untuk Pengukuran Indikator Lingkungan Hidup Mengacu SDGs .....	37
Tabel 2.1	Skala Likert dengan Pertanyaan Positif .....	61
Tabel 2.2	Skala Likert dengan Pertanyaan Negatif .....	62
Tabel 2.3	Variabel Dimensi dan Indikator Penelitian .....	63
Tabel 2.4	IKLH Provinsi Gorontalo Tahun 2016 .....	65
Tabel 2.5	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Gorontalo Tahun 2015 .....	69
Tabel 2.6	Gambaran Sanitasi di Provinsi Gorontalo .....	72
Tabel 2.7	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (dalam Juta Rupiah) Tahun 2012-2016 .....	75
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Komponen Tahun 2010-2015 .....	77
Tabel 2.9	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2015 .....	78
Tabel 2.10	Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2017 .....	79
Tabel 2.11	Hasil Uji Korelasi Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	85
Tabel 2.12	Korelasi antara Gabungan Dimensi pada Variabel Kualitas Lingkungan dengan Variabel Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	85
Tabel 2.13	Korelasi antara Beberapa Dimensi pada Kualitas Lingkungan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	86
Tabel 2.14	Hasil Uji Korelasi antara Berbagai Dimensi X dengan Variabel Y .....	88
Tabel 2.15	Hasil Uji Korelasi antara Variabel X dengan Variabel Y ....	92

Tabel 3.1	Matriks Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan .....	124
Tabel 3.2	Perubahan Beban Penyakit .....	127
Tabel 3.3	Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara .....	130
Tabel 3.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2014 .....	131
Tabel 3.5	Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010 .....	133
Tabel 3.6	Capaian dan Target Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu .....	136

---

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Sebaran Kejadian Kekeringan Tahun 2004-2011 .....	16
------------	---	----

---

## Daftar Grafik

Grafik 1.1	Data Deforestasi Indonesia Periode 1990-2012 .....	15
Grafik 1.2	Kejadian Banjir di Indonesia dari Tahun 2001-2011 .....	16
Grafik 2.1	Korelasi antara IPM, PDRB, dan Ranking IKLH .....	48
Grafik 2.2	Kondisi Dimensi Kebutuhan Dasar di Indonesia Berdasarkan Social Progress Index Tahun 2014 .....	59
Grafik 2.3	Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015 .....	67
Grafik 2.4	Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015 .....	68
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015 .....	75
Grafik 2.6	Tren Pertumbuhan IPM Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2015 .....	77
Grafik 2.7	Gambaran Responden .....	81



Grafik 2.8 Persepsi Responden terhadap Kondisi Lingkungan .....	82
Grafik 2.9 Persepsi Responden terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	83
Grafik 3.1 Penyebab Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010-2013 ....	138

---

## Daftar Diagram

Diagram 2.1 Desain Penelitian .....	64
Diagram 3.1 Determinan Kesehatan dalam Teori Blum .....	134



# Prolog

## Membaca Telaah Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia

(Catatan Editor)

Bagaimana membangun negara agar rakyatnya sejahtera dan lingkungan hidupnya berkelanjutan? Faktanya, ditemukan provinsi dengan indikator ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, tetapi memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rendah, contohnya DKI Jakarta; sedangkan di provinsi lain ditemukan IKLH tinggi, tetapi ranking PDRB rendah, contoh Provinsi Gorontalo (lihat Grafik 2.1).

Buku “INDIKATOR KESEJAHTERAAN, INDIKATOR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA” ini ditulis oleh 3 peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, berupaya mencari jawab atas pertanyaan tersebut.

Tulisan pertama tentang “PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: MENDEFINISIKAN, MENGOPERASIKAN, DAN MENGUKUR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL” oleh Sri Nurhayati Qodriyatun berupaya menelusuri jawab atas pertanyaan, “bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengukur pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional, terutama mengukur keberlanjutan lingkungan hidup.” Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu menelaah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidup, hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana mengukur keberlanjutan suatu pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui studi literatur, kajian ini dilakukan.

Upaya Qodriyatun, diawali dengan mengajukan kerangka pikir bahwa ada beberapa model hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Rambo dalam tulisan singkatnya berjudul “*Conceptual Approach to Human Ecology*” menyebut ada 6 model hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Model hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya inilah yang nantinya memengaruhi bagaimana manusia bertindak dan bersikap dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apa masalah yang akan dihadapi oleh manusia sebagai akibat dari tindakan dan sikapnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya.

Pada sub bab Hubungan Lingkungan Hidup dengan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat diuraikan tentang upaya dunia pencarian konsep dan kebijakan publik lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan. Namun menurutnya, tantangan mendasar dari pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk mendefinisikan, mengukur, dan mengoperasikannya. Cukup rumit untuk mengkuantitatifkan dan mengukur tingkat-tingkat sustainability suatu daerah, wilayah, atau suatu negara dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan rakyat, yaitu indikator dari CSD, indikator berdasar MDGs, dan indikator berdasar SDGs. IKLH adalah satu pengukuran tersendiri yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur keberlanjutan lingkungan, dengan 3 indikator yang digunakan, yaitu Indeks Pencemaran Udara (IPU), Indeks Pencemaran Air (IPA), dan Indeks Tegakan Hutan (ITH). Menurutnya 3 indikator tersebut belum dapat menggambarkan keberlanjutan lingkungan hidup, karena ada beberapa parameter yang tidak masuk dalam pengukuran IKLH yang dapat menguatkan gambaran keberlanjutan lingkungan hidup suatu wilayah. Parameter yang perlu ditambahkan adalah Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH), Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL). Namun pandangan ini perlu dibuktikan melalui suatu penelitian lebih lanjut, apakah penambahan 3 parameter dalam pengukuran IKLH dapat untuk menggambarkan keberlanjutan lingkungan hidup suatu daerah, dan apakah penambahan 3 parameter dalam pengukuran IKLH tersebut juga akan dapat menggambarkan keterkaitan hubungan antara kondisi lingkungan hidup dengan peningkatan kesejahteraan suatu wilayah.

Anih Sri Suryani, berupaya menjawab tantangan dengan meneliti “PENGARUH KUALITAS LINGKUNGAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, STUDI PERSEPSI DI PROVINSI GORONTALO”. Suryani melakukan analisis deskriptif tentang perlunya IKLH ditambahkan indikator keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat agar lebih komprehensif menggambarkan keberlanjutan lingkungan suatu kawasan.

Argumentasinya itu diuji coba di Gorontalo. Namun karena keterbatasan data maka indikator keanekaragaman hayati tidak disertakan. Analisis Suryani memperkuat argumentasi bahwa IKLH harus dilengkapi dengan 3 indikator lainnya agar dapat mewakili kondisi keberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Suryani melanjutkan kajiannya mencari hubungan kualitas lingkungan terhadap pemenuhan dasar (Tabel 2.3 halaman 62). Studinya bersasarkan persepsi masyarakat dengan menyebarkan kuesioner. Hasilnya adanya korelasi positif antara kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali kesehatan masyarakat yang berkorelasi negatif.

Temuan Suryani ini perlu dijelaskan lebih lanjut dan dikonfirmasi ulang karena bagaimana menjelaskan angka kematian bayi, anak, ibu sebagai indikator utama kesehatan masyarakat tidak berkorelasi dengan pemenuhan sarana prasarana kesehatan, lingkungan hidup yang baik, suplai air bersih dan pengelolaan sampah sebagai indikator fisik pemenuhan kebutuhan dasar? Jika semua instrumen telah terkonfirmasi, maka penelusuran bagaimana dengan kondisi Gorontalo sehingga masyarakat mempersepsikan kesehatan masyarakat tidak memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, perlu dilakukan.

Rahmi Yuningsih melengkapi kajian dengan menulis tentang “KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN MASYARAKAT”. Yuningsih menggunakan teori Blum, bahwa derajat kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh determinan lingkungan. Walaupun saat ini telah terjadi transisi epidemiologi yaitu perubahan dominasi beban penyakit pada masyarakat dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit berbasis lingkungan masih banyak ditemui seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, tuberkulosis dan lainnya.

Telaahnya tentang Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Untuk itu penilaian kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutannya tidak dapat

diwakilkan hanya pada kondisi udara, air dan tutupan hutan. Kondisi yang menggambarkan kesehatan (lingkungan dan masyarakat) perlu jadi tolak ukur.

Studinya di Gorontalo menunjukkan bahwa cakupan air bersih sampai dengan tahun 2016 sebesar 72,09%. Namun pemeliharaan sarana air bersih dapat dikatakan masih kurang. Salah satu program untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Melalui program tersebut, dibangun sarana air minum komunal. Sumber air dapat dikatakan bagus dan tidak tercemar kontaminan namun penampungan air dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tidak berjalan. Terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya kendala di pendanaan yaitu terhambatnya pengumpulan iuran atau retribusi. PDAM hanya melayani tingkat kabupaten/kota saja dan tidak sampai ke daerah pedalaman. Selain itu, untuk mendapatkan air bersih, masyarakat Provinsi Gorontalo juga masih menggunakan sumur gali namun bersifat terbuka dan rentan terkontaminasi kotoran hewan.

Membaca bunga rampai 3 peneliti ini kita akan mendapatkan gambaran tentang perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dan implementasinya di Indonesia. Kekuatan buku ini adalah kerangka pikir yang dikaji, yaitu upaya mencari tautan antar indikator kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana implementasinya di Indonesia.

Kompleksitas masalah perlu diuraikan menjadi informasi yang lebih sederhana dan terukur. Indikator adalah seperangkat nilai utama yang mewakili suatu keadaan. Indikator digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui, mengukur dan menilai suatu keadaan. Untuk menggunakan indikator dalam pengambilan kebijakan publik yang multi dimensi membutuhkan alat analisis lebih lanjut, misalnya permodelan.

Upaya menemukenali indikator terus berlanjut, begitu pula upaya mengembangkan model pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan indikator yang berhasil dirumuskan terus dikembangkan. Tujuannya adalah memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan publik yang mendekati kebutuhan nyata.

Mengingat kesenjangan dan ketimpangan antardaerah dan penduduk di Indonesia yang masih cukup tinggi, maka keberhasilan menemukenali indikator, mengembangkan model dan mengimplementasikan kebijakan

publik yang dapat mengatasi kondisi tersebut sangat penting. Saat ini pembangunan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih bertumpu pada modal lingkungan (dan sumber daya alam). Untuk itu pengembangan indikator, model dan implementasi kebijakan publik yang menyerap dimensi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat yang holistik dan komprehensif sangat dibutuhkan.

Dalam konsep *social justice*, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menganjurkan ***sustainable governance indicators*** yang dapat diterapkan dan jadi salah satu ukuran keberhasilan negara-negara OECD dalam membangun secara berkelanjutan, yaitu:

- a. *Access to education* (akses pendidikan yang lebih baik);
- b. *Labor market inclusion* (kesempatan yang sama dalam pasar tenaga kerja dan usaha);
- c. *Social cohesion and non-discrimination* (kerukunan dan kesamaan sosial);
- d. *Health* (akses kesehatan yang lebih baik);
- e. *Intergenerational justice* (keadilan antargenerasi).

Indonesia terus mengupayakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Uraian Sri Nurhayati Qodiyatun, Anih Sri Suryani dan Rahmi Yuningsih menjelaskan hal tersebut. Tantangan terbesarnya adalah tatkala model tersebut diimplementasikan, maka masalah yang akan diatasi dapat terkoreksi menjadi lebih baik. Temuan Suryani di atas mengingatkan pada kita bahwa upaya ini belum berakhir.

Selamat membaca. Selamat mengkaji.

Jakarta, 24 September 2017

Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi  
Editor

## Epilog

Membaca buku “INDIKATOR KESEJAHTERAAN, INDIKATOR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA” kita dihadapkan pada fakta bahwa terdapat daerah yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang tinggi, tetapi kesejahteraan masyarakatnya rendah, dan sebaliknya terdapat daerah yang memiliki kualitas lingkungan rendah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya tinggi.

Data tersebut menunjukkan bahwa model pembangunan di Indonesia masih ekstraktif terhadap lingkungan, tidak ramah dan belum berkelanjutan. Daerah yang berhasil memanfaatkan potensi lingkungannya secara optimal untuk kegiatan ekonomi (pemanfaatan secara masif ruang seperti Jakarta), maka ekonomi daerah meningkat dan ekonomi rakyat serta kesejahtraannya membaik, walau akibatnya lingkungan hidupnya menjadi tidak baik. Sebaliknya, daerah yang kondisi lingkungan alaminya tidak dieksploitasi secara masif, maka ekonominya tidak berkembang, begitu pula dengan kesejahteraan rakyatnya.

Kondisi ini memberikan pembelajaran bagi kita tentang bagaimana mengembangkan kebijakan pembangunan yang meningkatkan ekonomi daerah, ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyatnya tetapi lingkungan hidup tetap lestari?

Ada 4 prinsip yang direkomendasikan untuk mengimplementasikan masalah lingkungan dalam pembangunan, yaitu:

- a. menginvestasikan ulang hasil pemanfaatan sumber daya pada pemulihannya;
- b. mengembangkan kebijakan yang menangkal terjadinya krisis modal sumber daya alam yang dapat ditunjukkan dari tingkat minimum kelimpahannya;



- c. mengintegrasikan keberlanjutan sosial, lingkungan dan ekonomi dalam kebijakan publik secara holistik dan komprehensif;
- d. memanen kelimpahan sumberdaya alam untuk kegiatan pengembangan ekonomi setelah dikurangi pemulihan dampak lingkungan, sosial dan ekonominya.

Berdasarkan 4 prinsip tersebut dapat dikembangkan kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu:

- a. mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi pada seluruh level kebijakan, perencanaan dan pengelolaan. Ini berarti pemanfaatan lingkungan dan sumberdaya alam lokal diawali dengan penyiapan sumberdaya manusia lokal sebagai pelaku utamanya;
- b. menetapkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang efektif;
- c. mengembangkan penggunaan secara efektif instrumen ekonomi dan pasar, antara lain insentif dan dis-insentif; dan
- d. mengintegrasikan lingkungan dan ekonomi dalam sistem akutansi yang baik.

Bagaimana ke 4 prinsip dan 4 kerangka kerja tersebut diimplementasikan?

Jika penelitian ini bisa dilanjutkan dalam prespektif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang legislasi, pengawasan dan peganggaran sebagaimana kewenangan DPR, maka akan memberi nilai tambah dan menjadi ciri khas sekaligus pembeda dari penelitian institusi lainnya.

Salam.

Jakarta, 24 September 2017

Dr. Herdianto Wahyu Kustiadi  
Editor

# Index

## A

air bersih 3, 4, 16, 23, 55, 57, 58, 60, 66, 71, 83, 94, 121, 128, 131, 140, 141

## G

Green Constitution 20, 42

## I

Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH) 2, 36, 42, 52

Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) 2, 36, 42, 52

Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) 2, 36, 42, 52

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1, 34, 47, 51, 128

## K

keanekaragaman hayati 3, 19, 28, 31, 33, 35, 47, 52, 53, 69, 73, 82, 86, 89, 93, 94, 95, 129, 131, 132

kebutuhan dasar 3, 8, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 60, 62, 63, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 146

kesehatan lingkungan 3, 36, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 69, 72, 82, 83, 86, 89, 91, 93, 94, 95, 131, 142

kesehatan masyarakat 3, 17, 36, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 68, 69, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142

kesejahteraan masyarakat 1, 2, 4, 5, 7, 9, 17, 36, 41, 58, 60, 142, 145, 146

kualitas air 17, 27, 30, 34, 35, 36, 47, 51, 65, 66, 82, 89, 93, 95, 128, 129

kualitas udara 27, 34, 35, 47, 51, 82, 86, 89, 93, 95, 128, 129

## L

Lingkungan Hidup 1, 2, 9, 15, 17, 20, 21, 22, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 72, 82, 96, 97, 98, 99, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 143, 144

## M

Model Ekologi Budaya (*the model of cultural ecology*) 12

Model Ekologi Manusia Berbasis Aktor (*the actor-based model of human ecology*) 12

Model Ekologi Manusia Berbasis Ekosistem (*the ecosystem-based model of human ecology*) 12

Model Kemungkinan Lingkungan (*the model of environmental possibilism*) 11

morbiditas 55, 56, 131, 132, 133, 136, 139, 140

mortalitas 55, 56, 127, 131, 132, 136, 138

## P

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) 1, 21, 41

Pembangunan kesejahteraan sosial 58

Pembangunan Manusia 1, 48, 74, 76, 77, 94

penyakit menular 3, 53, 54, 55, 67, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141

penyakit tidak menular 3, 126, 133

Provinsi Gorontalo 1, 4, 44, 48, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 91, 93, 94, 95, 97, 100, 104, 125, 128, 140, 141, 142

## S

sanitasi 4, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 53, 55, 56, 57, 58, 70, 72, 83, 91, 98, 128, 131, 135, 138, 140, 141

Skala Likert 61, 62

status gizi 22, 55, 56, 83, 126, 131, 133, 136

## T

teori Blum 3, 126, 134, 142

*the law of diminishing return* 14

tutupan hutan 4, 34, 36, 47, 66, 128, 129

## Biografi Editor dan Penulis

**Herdianto Wahyu Kustiadi.** Menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Lingkungan UI dengan disertasi, “Pembangunan Berkelanjutan Ibukota Negara”. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Studi Ilmu Lingkungan UI dengan tesis “Analisis Manfaat Biaya Reklamasi Pantai Utara Jakarta.” Menjadi Sekjen Perwaku (Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia) selama 2 periode. Menjadi *Executive Secretary* di Cinaps (*Center for Information and Policy Studies*) tahun 1999-2002. Aktif dalam kegiatan penelitian dan konsultasi.

---

**Sri Nurhayati Qodriyatun.** Menyelesaikan sarjana Sosiologi di FISIPOL UGM dan Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi (Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi)” (2013), “Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan: Permasalahan yang Belum terselesaikan” (2014), “Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)” (2015), “Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditengah Ancaman Perubahan Iklim” (2016). Peneliti dapat dihubungi pada email [sri.qodriyatun@dpr.go.id](mailto:sri.qodriyatun@dpr.go.id)

**Anih Sri Suryani.** Menyelesaikan pendidikan sarjana Geofisika dan Meteorologi dan magister Teknik Lingkungan di ITB. Saat ini menjabat Peneliti Muda Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis yang pernah diterbitkan antara lain berjudul: “Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Daerah Pesisir dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat” (2013), “Pelindungan Kesehatan bagi Petugas Pengelola Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Gianyar Bali)” (2014), “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)” (2014), “Capaian MDGs Indonesia Bidang Sanitasi” (2014), “Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Provinsi Jawa Barat” (2015). Peneliti dapat dihubungi pada email [anih.suryani@dpr.go.id](mailto:anih.suryani@dpr.go.id)

---

**Rahmi Yuningsih.** Menyelesaikan sarjana dan magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Saat ini menjabat Peneliti Muda Kesehatan Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis yang pernah diterbitkan antara lain “Malaria Center: Sebuah Model Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit Malaria di Provinsi Maluku Utara”, “Perlindungan Konsumen dari Dampak Buruk Makanan Tidak Halal bagi Kesehatan”. Peneliti dapat dihubungi pada email [rahmi.yuningsih@dpr.go.id](mailto:rahmi.yuningsih@dpr.go.id)